



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Jakarta : Adeksi, 2004
- Irwan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1976
- JimlyAsshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Josef Riwu Kaho, MPA, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010
- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
- Nimatul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1981.
- Syueb Sudono, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008.
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung : Fokusmedia, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta(cetakan II), 1998.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat.

Peraturan DPRD Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

### C. Website

<http://www.kumham-jogja.info/37-karya-ilmiah-lainnya/90-prinsip-prinsip-dasar-perancangan-peraturan-daerah/>

<http://reportaseinvestigasi.com/news1016/satpol-pp-pariaman-sosialisasikan-perda-no-10-tahun-2013-bagi-pengusaha-warnet/>